

Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Rasio Utang terhadap Keberlanjutan Finansial pada Provinsi di Indonesia

Disma Suci Rohmadani¹⁾, Henny Yulsiati²⁾, Yuliana Sari³⁾

^{1,2,3)} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

^{1,2,3)} dismasuci279@gmail.com, henny.yulsiati@polsri.ac.id, yuliana_sari@polsri.ac.id

ABSTRACT

This research was designed with the aim of studying the impact of regional financial independence and the debt to financial sustainability ratio on provincial governments in Indonesia. This research uses data from Regional Government Financial Reports (LKPD) for the 2018-2022 period. This type of research is quantitative research. The population of this research is local governments in 34 provinces in Indonesia. The sample used was a saturated sampling technique. The data collection technique used is documentary. The data source uses secondary data. The data analysis method uses multiple regression analysis for panel data. From the research results, it can be concluded that regional financial independence has a positive and significant effect on financial sustainability, while the debt to income ratio has a negative and significant effect on financial sustainability. Simultaneously, regional financial independence and the debt-to-income ratio have a significant impact on financial sustainability in provinces in Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini dirancang dengan tujuan untuk mempelajari dampak kemandirian keuangan daerah dan rasio utang terhadap keberlanjutan finansial pada pemerintah Provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) periode 2018-2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah di 34 provinsi di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumenter. Sumber datanya menggunakan data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda untuk data panel. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan finansial, sedangkan rasio utang pada pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan finansial. Secara simultan kemandirian keuangan daerah dan rasio utang pada pendapatan mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan finansial pada Provinsi di Indonesia.

Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Utang pada Pendapatan, Keberlanjutan Finansial

1. PENDAHULUAN

Sektor keuangan global saat ini berada pada titik perubahan kritis, dimana terjadi pergeseran paradigma besar. Ini bukan hanya sebuah revolusi dalam teknologi finansial, namun juga pergeseran menuju keuangan berkelanjutan atau keberlanjutan finansial dan *impact finance*. Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, pada tahun 2015 PBB mengadakan sidang mengenai “*The 2030 agenda for sustainable development. General Assembly*”, terdapat agenda jangka panjang yang disepakati oleh 193 negara, yaitu agenda pembangunan berkelanjutan dengan agendanya perumusan Kebijakan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi bumi, dengan mencapai 17 (tujuh belas) tujuan pada tahun 2030. Untuk memudahkan pelaksanaannya, 17 tujuan TPB dikelompokkan menjadi empat pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan hidup, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola (*UN General Assembly*, 2015).

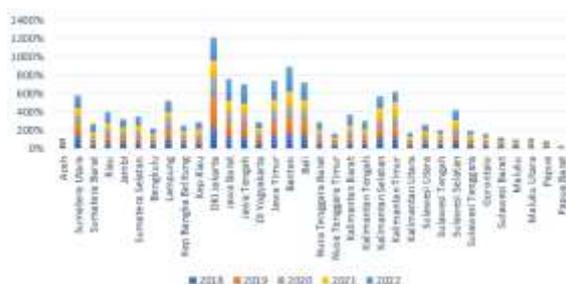
Dalam pertemuan PBB ini ditegaskan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan faktor-faktor regional, khususnya pemerintah daerah. Diakui bahwa pemerintah daerah mempunyai posisi penting untuk menerapkan strategi dan bekerja sebagai mediator agenda lokalisasi internasional (Gustafsson & Mignon, 2020). Pemerintah daerah diharapkan memainkan peran yang lebih besar dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dengan menilai kondisi lokal, mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya, mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan, menerapkan kebijakan dan memprioritaskan proyek yang sesuai (Satterthwaite, 2017). Peran elaborasi empiris yang dimainkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan masyarakat yang berkelanjutan, termasuk TPB, sangat membantu untuk memahami jaringan kompleks tata kelola daerah untuk pembangunan berkelanjutan (Masuda et al., 2022).

Dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, keadaan keuangan negara dianggap sebagai faktor utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan sesuai dengan agenda PBB. Untuk mendukung program PBB tentang TPB, Pemerintah

Indonesia membuat Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peningkatan pendapatan asli daerah yang besar memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi (Kusumawati & Wiksuana, 2018). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah yang belum mencukupi untuk membiayai program-program yang akan dilaksanakan pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi serta kebutuhan mendesak dari masyarakat, maka pemerintah dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan langkah strategis dengan mengambil opsi pinjaman atau utang. Apabila suatu daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang rendah, memungkinkan daerah tersebut melakukan pinjaman daerah (Al-Obaidi & Almashhadani, 2023). Terlalu banyak melakukan pinjaman daerah akan berdampak pada beban utang yang tidak dapat dikendalikan dengan baik yang dapat menyebabkan akumulasi beban utang yang berlebihan bagi suatu daerah.

Peningkatan pendapatan asli daerah dapat mengukur kemandirian keuangan daerah tersebut, semakin tinggi kemandirian keuangan daerah maka semakin banyak pendapatan asli daerah yang digali. Kemandirian keuangan daerah pada Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



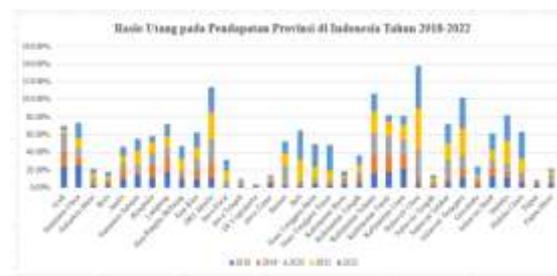
Sumber: Diolah peneliti, 2024

Gambar 1. Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa masih ada beberapa provinsi di Indonesia dengan tingkat kemandirian keuangan daerah dalam kategori rendah sekali yaitu 0-25%. Provinsi

tersebut didominasi oleh Indonesia bagian Timur, hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah yang diterima oleh beberapa provinsi tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan belanja daerah, sehingga beberapa provinsi memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman provinsi lain untuk melaksanakan kegiatan belanja daerah. Hal yang serupa juga terjadi di Indonesia bagian Barat, seperti Provinsi Aceh, Bengkulu, dan Kep.Bangka Belitung dengan tingkat kemandirian keuangan dalam kategori rendah yaitu 25-50%.

Apabila suatu daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang rendah, memungkinkan daerah tersebut melakukan pinjaman daerah (Al-Obaidi & Almashhadani, 2023). Terlalu banyak melakukan pinjaman daerah akan berdampak pada beban utang yang tidak dapat dikendalikan dengan baik yang dapat menyebabkan akumulasi beban utang yang berlebihan bagi suatu daerah. Berikut ini rasio utang pada pendapatan Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 2.



Sumber: Diolah peneliti, 2024

Gambar 2. Rasio Utang Daerah pada Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar 2, dapat dilihat bahwa rasio utang pemerintah daerah di beberapa provinsi di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan. Jika pinjaman atau utang yang diambil oleh pemerintah daerah melebihi pendapatan yang diperoleh, maka akan menghasilkan defisit operasional (Wardhani & Payamta, 2020). Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk mengambil pinjaman dengan memperhatikan kemampuan daerah untuk melunasi utang dan menghindari risiko fiskal terhadap keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya telah meneliti topik dan penelitian mengenai keberlanjutan finansial terutama dilakukan di organisasi bisnis seperti bank. Di sektor publik, penelitian mengenai keberlanjutan finansial masih terbatas di negara-negara Eropa, Australia, dan Amerika Serikat. Penelitian terkait keberlanjutan finansial pada sektor publik dilakukan oleh (Lhutfi & Sugiharti, 2022) dengan menggunakan variabel total populasi, PDRB, dan

financial independence. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total populasi berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan finansial sedangkan PDRB dan *financial independence* berpengaruh positif terhadap keberlanjutan finansial. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wardhani & Payamta, 2020) dimana penelitian tersebut menggunakan variabel jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, PDRB (produk domestik regional bruto), kemandirian keuangan, dan *debt to revenue*, penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan rasio utang memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap keberlanjutan finansial dan kemandirian keuangan mempunyai pengaruh yang positif terhadap keberlanjutan finansial. Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan finansial di sektor pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan. Selain itu, populasi penelitian ini yakni seluruh provinsi di Indonesia berbeda dari peneliti sebelumnya yang menggunakan kota/kabupaten di Indonesia sebagai populasinya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah dan rasio utang terhadap keberlanjutan keuangan secara parsial dan simultan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Neo-Institusionalisme*

Teori *institusionalisme* baru atau dikenal dengan *neo-institusionalisme* merupakan pengembangan dari teori *institusionalisme* yang memiliki pandangan bahwa sebuah institusi merupakan pusat dari fenomena sosial dan politik. “*Neo-institusionalisme* mengacu pada kekuatan-kekuatan yang mendorong dan menggambarkan lembaga dalam hal fitur formal dan non-formal”, (Putra & Sanusi, 2019). “Teori *neo-institusionalisme* menekankan bahwa sebuah institusi juga dapat berfungsi sebagai objek selain menjelaskan institusi formal seperti sistem hukum, agama, ekonomi, dan masyarakat”, (Hadler, 2015).

Teori *neo-institusionalisme* menjelaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan perekonomian yang baik ada pada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah berusaha mengelola anggarannya dalam pengelolaan keuangan atau bidang lainnya agar memberikan hasil yang terbaik, sehingga pemerintah daerah akan terpaksa melaksanakan anggaran tersebut secara efektif dan efisien. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga ikut terlibat dalam menetapkan kebijakan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Keberlanjutan Finansial

Keberlanjutan Finansial merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi atau pinjaman untuk membiayai investasi”, (Brothaler et al., 2015). Kemampuan untuk memenuhi kewajiban saat ini dan masa depan melalui penerimaan pajak, transfer dan kualitas layanan berupa infrastruktur yang baik untuk menegakkan kualitas layanan kepada masyarakat disebut Keberlanjutan finansial.

Keberlanjutan finansial dapat membantu mendukung operasi yang efektif di semua tingkat pemerintahan untuk mengambil keputusan yang tepat, meningkatkan kualitasnya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang diperlukan agar generasi mendatang dapat berkembang (Subires et al., 2019). “Keberlanjutan finansial tidak hanya memberikan informasi yang berguna untuk memprediksi dan mengatasi risiko, tetapi juga bertujuan untuk menjaga pelayanan bagi generasi mendatang dengan kualitas dan kuantitas yang sama dengan pelayanan publik” (Wardhani & Payamta, 2020). Hal tersebut sesuai dengan konsep yang lebih luas mengenai keberlanjutan keuangan menurut (IFAC, 2013) menetapkan bahwa keberlanjutan finansial terdiri dari tiga dimensi: pendapatan, layanan, dan utang.

Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2019:232), “kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”. Menurut Mahmudi (2019:140), “kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman”.

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan juga menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi indeks kemandirian keuangan daerah berarti tingkat ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat semakin menurun dan diyakini mampu mewujudkan otonomi daerah. Apabila daerah mampu memberikan pelayanan publik dengan menggunakan sumber pendapatan asli daerah, maka tingkat keberlanjutan finansial daerah akan terjamin.

Rasio Utang pada Pendapatan

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, “Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau

kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah”.

Pada penelitian ini, utang daerah diukur dengan rasio total utang terhadap total pendapatan. Rasio utang terhadap pendapatan merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan daerah yang digunakan untuk membayar kembali pinjaman (Wardhani dan Payamta, 2020). Pengelolaan utang daerah yang kurang baik dapat melemahkan keberlanjutan finansial suatu daerah. Jika pemerintah terus melakukan pinjaman tanpa memiliki sumber pendapatan yang memadai dan tanpa diversifikasi sumber pendapatan yang memadai, utang ini dapat menyebabkan peningkatan defisit fiskal dan mengancam stabilitas keuangan negara (Al-Obaidi dan Al-Mashhadani, 2023).

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Keberlanjutan Keuangan

Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keberlanjutan finansial, artinya pemerintah daerah dapat menggunakan penerimaannya daerahnya sendiri dan tidak bergantung pada pinjaman atau sumber luar, sehingga tidak akan terbebani oleh pinjaman (Lutfi & Sugiharti, 2022). Kemandirian keuangan secara signifikan berdampak pada surplus operasi. Kemandirian keuangan dapat menjadi salah satu tanda untuk mengevaluasi kondisi keuangan suatu daerah (Brusca et al., 2015). Hasil penelitian mengenai rasio kemandirian keuangan daerah secara substansial berkontribusi positif terhadap keberlanjutan finansial (Kusumawati & Wiksuana, 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah dan keberlanjutan finansial sebagai berikut.

H1: Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan.

Pengaruh Rasio Utang terhadap Keberlanjutan Keuangan

Penelitian yang dilakukan sebelumnya menjelaskan bahwa rasio utang pada pendapatan berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan finansial, artinya apabila suatu daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang rendah, memungkinkan daerah tersebut melakukan pinjaman daerah. Terlalu banyak melakukan pinjaman daerah akan berdampak pada beban utang yang tidak dapat dikendalikan dengan baik yang dapat menyebabkan akumulasi

beban utang yang berlebihan bagi suatu daerah yang menyebabkan tingkat keberlanjutan finansial menurun (Al-Obaidi & Almashhadani, 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis berkaitan dengan rasio utang pada pendapatan dan keberlanjutan finansial sebagai berikut.

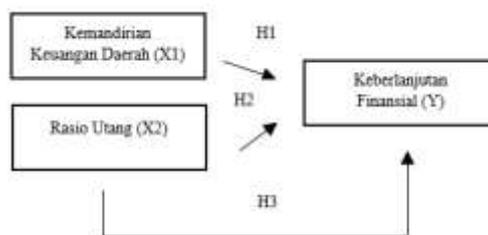
H2: Rasio utang pada Pendapatan berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan keuangan.

Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Utang terhadap Keberlanjutan Keuangan

Pengaruh kemandirian keuangan daerah dan rasio utang terhadap pendapatan, terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah daerah menjadi faktor yang penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga keberlanjutan keuangan pemerintah daerah. Daerah yang memiliki lebih banyak sumber pendapatan eksternal daripada internal dapat menghadirkan risiko yang menghambat keberlanjutan keuangan, sehingga kemandirian keuangan yang tinggi dapat menjadi faktor pendorong dalam mencapai Keberlanjutan finansial (Subires et al., 2019). Pada saat yang sama, pengelolaan keuangan pemerintah yang efektif, terutama dengan meminimalkan pengeluaran yang tidak terkait dengan pelayanan publik, dapat memunculkan faktor untuk mendorong adanya Keberlanjutan finansial. Kemandirian keuangan daerah dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola anggaran dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai program-program penting (Wardhani & Payamta, 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian dengan hubungan rasio utang pada pendapatan terhadap keberlanjutan finansial adalah sebagai berikut.

H3: Kemandirian keuangan daerah dan rasio utang pada pendapatan, berpengaruh secara simultan terhadap keberlanjutan keuangan.



Gambar 3. Hipotesis Penelitian

3. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut

(Sugiyono, 2018), “penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, yang digunakan untuk meneliti pada sampel tertentu, dan pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Menurut (Sugiyono, 2018) “penelitian deskriptif adalah penelitian penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain”.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia yang mencakup 34 Provinsi. Data diperoleh melalui akses ke portal *E-PPID* Pusat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yaitu *e-ppid.bpk.go.id* untuk tahun anggaran 2018-2022. Dalam penelitian ini variabel independen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah (X1) dan Rasio Utang pada Pendapatan (X2), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Keberlanjutan finansial* (Y). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang mana terlebih dahulu dilakukan pemilihan model data panel, uji asumsi klasik dengan menggunakan alat bantu program *Econometric Views (EViews)* versi 12.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
<i>Keberlanjutan finansial</i> (Y)	-Pendapatan Operasional -Beban Operasional -Pos Luar Biasa	Rasio
Kemandirian Keuangan Daerah (X1)	-Pendapatan Asli Daerah -Pendapatan Transfer Pusat -Pendapatan Transfer Provinsi -Pinjaman	Rasio
Rasio Utang pada Pendapatan (X2)	-Utang Daerah -Pendapatan Daerah	Rasio

Sumber: Diolah peneliti, 2024

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif

	Keberlanjutan finansial	Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Utang
Mean	26,81	0,751	0,103
Med	26,84	0,568	0,080
Max	30,73	3,141	0,485
Min	21,66	0,044	0,007
Std.D	1,5015	0,563	0,090

Sumber: Diolah peneliti, 2024

Hasil analisis statistik variabel *keberlanjutan finansial* menyatakan bahwa selama tahun 2018-2022 *Keberlanjutan finansial* yang terendah diraih Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 yaitu sebesar 21,66. sedangkan *Keberlanjutan finansial* yang tertinggi dicapai di tahun 2019 oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 30,73. Hasil analisis statistik variabel kemandirian keuangan daerah menyatakan bahwa, Selama tahun 2018-2022 rasio kemandirian keuangan daerah yang terendah diraih Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,04456 atau sebesar 4,456%, sedangkan rasio kemandirian keuangan yang tertinggi dicapai di tahun 2019 oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,14106 atau sebesar 314,106%. Rata-rata sebesar 0,75150 atau sebesar 75,15% dengan standar deviasi sebesar 0,56385 atau sebesar 56,385% membuat data tidak ada kesenjangan. Hasil analisis statistik variabel rasio utang pada pendapatan Selama tahun 2018-2022 rasio utang pada pendapatan yang terendah diraih oleh Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,00708 atau sebesar 0,708%, sedangkan rasio utang pada pendapatan yang tertinggi dicapai di tahun 2022 oleh Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,48507 atau sebesar 48,507%. Rata-rata sebesar 0,10316 atau sebesar 10,316% dengan standar deviasi sebesar 0,09001 atau sebesar 9,001% sehingga membuat data semakin beragam.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Centered VIF
X1	1,000000
X2	1,000000

Sumber: Diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 3 diketahui nilai *centered VIF* kedua variabel independen kurang dari 10, artinya tidak ada masalah multikolinearitas pada model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Obs*R-Squared</i>	<i>Prob. Chi-Square(2)</i>
0,235945	0,8887

Sumber: Diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *Prob. Chi-Square* pada *Obs*R-Squared* sebesar 0,8887. Dapat diketahui bahwa nilai *Prob. Chi-Square* pada *Obs*R-Squared* > 0,05, maka H_0 ditolak yang berarti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Durbin Watson Stat</i>	1,726725
---------------------------	-----------------

Sumber: Diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson Stat* sebesar 1,726725. Dapat diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* terletak diantara -2 dan +2 yang berarti tidak terdapat masalah autokorelasi pada model regresi.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi data panel pada penelitian ini yaitu:

$$Y = 26,9596 + 0,12457 * X_1 - 2,38325 * X_2$$

Persamaan regresi diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta regresi sebesar 26,9596. Artinya jika variabel kemandirian keuangan daerah dan rasio utang pendapatan sama dengan 0, maka nilai *keberlanjutan finansial* bertanda positif 26,9596.
2. Koefisien regresi variabel kemandirian keuangan daerah sebesar 0,12457 yang berarti setiap variabel kemandirian keuangan daerah akan meningkatkan *keberlanjutan finansial* sebesar 0,12457 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
3. Koefisien regresi variabel rasio utang pada pendapatan sebesar - 2,38325 yang berarti setiap variabel rasio utang pada pendapatan akan mengurangi tingkat *keberlanjutan finansial* sebesar 0,12457 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis model regresi linear berganda, sebagai berikut dengan melalui uji koefisien determinasi (R^2), uji

signifikansi parsial (uji statistik t), dan uji signifikansi simultan (uji statistik F).

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>R-Squared</i>	<i>Adjusted R-Squared</i>
0,941220	0,925867

Sumber: Diolah peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel 6 dan hasil koefisien determinasi terlihat jelas koefisien determinasinya adalah:

1. Hasil *R-Squared* sebesar 0,941220. Koefisien determinasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu model dapat menjelaskan variabel independen.
2. Hasil *Adjusted R-Squared* sebesar 0,925867. Nilai tersebut mempunyai arti bahwa stabilitas keuangan dipengaruhi oleh kemandirian keuangan daerah dan rasio utang terhadap pendapatan sebesar 92,58%, sedangkan sisanya sebesar 7,42% dipengaruhi secara material oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam analisis ini.

Hasil Uji t (Uji Parsial)

Tabel 7. Hasil Uji t (Uji Parsial)

<i>Variable</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
X1	2,353741	0,0782
X2	-5,675936	0,0048

Sumber: Diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 7 hasil uji t, dapat dilakukan pengujian sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai t tabel, diperoleh nilai t hitung > t tabel (2,353741 > 1,974185) maka H_1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kemandirian keuangan daerah secara parsial memengaruhi *keberlanjutan finansial*. Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi > 0,05, maka H_1 diterima dan jika signifikansi > 0,05 maka H_1 ditolak. Karena signifikansi pada uji t lebih dari 0,05 (0,078 > 0,05) maka H_1 ditolak. Artinya kemandirian keuangan daerah memengaruhi namun tidak signifikan terhadap *keberlanjutan finansial*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Luthfi & Sugiharti, 2022) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap *keberlanjutan finansial*, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi di Indonesia dapat mengelola sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan baik sehingga secara berkelanjutan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas tanpa harus

meninggalkan beban atau utang bagi generasi yang akan datang.

2. Berdasarkan nilai t tabel, diperoleh nilai -t hitung $< -t$ tabel ($-2,926781 < -5,675936$) maka H2 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel rasio utang pada pendapatan secara parsial memengaruhi *keberlanjutan finansial*. Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $< 0,05$ maka H2 diterima, dan jika signifikansi $> 0,05$ maka H2 ditolak. Karena signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 ($0,0048 < 0,05$) maka H2 diterima. Artinya rasio utang pada pendapatan secara signifikan memengaruhi *keberlanjutan finansial*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Campos et al., 2023), yang menyatakan bahwa beberapa negara tidak berkelanjutan secara finansial (*keberlanjutan finansial*) dikarenakan rasio utang yang semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh (Frintrup & Hilgers, 2023) menyatakan bahwa rasio utang pada pendapatan sebagai faktor risiko *keberlanjutan finansial*, artinya semakin tinggi rasio utang pada pendapatan maka tingkat *finansial sustainability* pada suatu daerah akan menurun. Apabila suatu daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang rendah, memungkinkan daerah tersebut melakukan pinjaman daerah. Terlalu banyak melakukan pinjaman daerah akan berdampak pada beban utang yang tidak dapat dikendalikan dengan baik yang dapat menyebabkan akumulasi beban utang yang berlebihan bagi suatu daerah yang menyebabkan *finansial sustainability* menurun (Al-Obaidi & Almashhadani, 2023).

Hasil Uji F (Uji Simultan)

Tabel 8. Hasil Uji F (Uji Simultan)

<i>F-Statistic</i>	<i>Prob (F-statistic)</i>
61,30498	0,000000

Sumber: Diolah peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel 8 diperoleh nilai F-hitung sebesar $61,30498 > F$ -tabel sebesar 3,05012, dan H3 diterima, sehingga dapat dikatakan kemandirian keuangan daerah dan rasio utang pada pendapatan secara simultan mempengaruhi *keberlanjutan finansial*. Berdasarkan signifikansi tersebut diperoleh nilai probabilitas F sebesar $0,000000 < 0,05$ yang dapat didefinisikan sebagai kemandirian keuangan daerah dan rasio utang pada pendapatan secara signifikan dampaknya besar, maka akan berdampak besar juga pada *keberlanjutan finansial*. Apabila pemerintah daerah secara bersama-sama memiliki tingkat kemandirian daerah yang tinggi, dan mengurangi utang daerah yang meningkat serta menggali potensi rasio pajak daerah yang semakin

tinggi maka dapat memungkinkan terwujudnya Keberlanjutan finansial.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berikut ini merupakan simpulan yang dapat diambil dari hasil analisis dan diskusi pada bab sebelumnya:

1. Variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *keberlanjutan finansial* dikarenakan tingkat kemandirian daerah pada Pemerintah Provinsi Indonesia sudah cukup baik. Artinya semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, maka akan meningkatkan *keberlanjutan finansial* terhadap daerah tersebut.
2. Variabel rasio utang pada pendapatan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Keberlanjutan finansial*. Artinya, rasio utang terhadap pendapatan yang lebih tinggi akan berdampak negatif terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah daerah di Indonesia di masa depan.
3. Variabel kemandirian keuangan daerah dan rasio utang terhadap pendapatan secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *keberlanjutan finansial*.

5.2. Saran

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan kembali variabel independen yang mempengaruhi *keberlanjutan finansial* karena penelitian ini dilakukan berdasarkan informasi dari laporan keuangan sehingga peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel-variabel lain di luar dari informasi laporan keuangan seperti variabel jumlah penduduk, tingkat pengangguran, maupun kualitas sumber daya manusia. Dengan menggunakan periode tahun yang panjang maupun objek penelitian yang berbeda juga. Selain itu Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan finansial pada pemerintah Provinsi di Indonesia dengan menggali potensi pendapatan asli daerah. Semakin tinggi tingkat keberlanjutan finansial, maka pemerintah daerah dapat menghasilkan pelayanan publik secara berkelanjutan tanpa membebankan utang kepada generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Obaidi, M. B. M., & Almashhadani, A. N. 2023. "Keberlanjutan finansial Assessment in Iraq for The Period 2015-2021". *Resmilitaris*, 13(1), 21–29.

- Andrews, R. 2015. "Vertical consolidation and keberlanjutan finansial: evidence from English local government". *Environment and Planning C: Government and Policy*, 33(6), 10–24. <https://doi.org/10.1177/0263774X15614179>.
- Bröthaler, J., Getzner, M., & Haber, G. 2015. "Sustainability of local government debt: a case study of Austrian municipalities". *Empirica*, 42(3), 521–546. <https://doi.org/10.1007/s10663-014-9261-3>.
- Campos, E.L., & Cysne, R.P. 2023. "Public finances sustainability by panel data models with cross-sectional dependence: analysis of Brazilian states". *Nova Economia*, 33, 121 - 151. <http://dx.doi.org/10.1590/0103-6351/7588>.
- Campos, E.L., & Cysne, R.P. 2023. "Public finances sustainability by panel data models with cross-sectional dependence: analysis of Brazilian states". *Nova Economia*, 33, 121 - 151. <http://dx.doi.org/10.1590/0103-6351/7588>.
- Frintrup, M., & Hilgers, D. 2023. "Drivers and risk factors of German local keberlanjutan finansial focusing on adjusted income". *International Review of Administrative Sciences*. DOI: 10.1177/00208523221143289.
- Gustafsson, S., & Mignon, I. 2020. "Municipalities as intermediaries for the design and local implementation of climate visions". *European Planning Studies*, 28(6), 1161–1182. <https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1612327>.
- Hadler, M. 2015. "Institutionalism and Neo-institutionalism: History of the Concepts. In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition" (pp. 186–189). *Elsevier Inc.* <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.03187-1>.
- Halim, Abdul. & Kusufi. 2019. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Bandung: Salemba Empat.
- International Federal Accountants. 2014. *The Importance of Accrual-based Financial Reporting In the Public Sector*. Diakses pada 5 Maret 2024 pada <https://www.ifac.org/>
- Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. 2018. "Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali". *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(5), 2592–2620. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJMUNUD>.
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022.
- Lhutfi, I., & Sugiharti, H. 2022. "Keberlanjutan finansial of Local Governments in Indonesia". *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1), 159–170. <https://doi.org/10.17509/jurnal>.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi 4*. UPP: STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masuda, H., Kawakubo, S., Okitasari, M., & Morita, K. 2022. "Exploring the role of local governments as intermediaries to facilitate partnerships for the Sustainable Development Goals". *Elsevier*, 82. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.103883>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan*.
- Putra, F., & Sanusi, A. 2019. *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institutionalisme: Teori dan Praktek*. LP3ES.
- Satterthwaite, D. 2017. "Successful, safe and sustainable cities: towards a New Urban Agenda". *Commonwealth Journal of Local Governance*, 3–18. <https://doi.org/10.5130/cjlg.v0i19.5446>.
- Subires, M. D. L., Muñoz, L. A., Galera, A. N., & Bolívar, M. P. R. 2019. "The influence of socio-demographic factors on keberlanjutan finansial of public services: A comparative analysis in regional governments and local governments". *Sustainability (Switzerland)*, 11(21). <https://doi.org/10.3390/su11216008>.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D Edisi 1*. Bandung: Alfabeta.
- Tri Wardhani, D., & Payamta. 2020. "Menguji faktor determinan keberlanjutan finansial pada sektor pemerintah". *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(1), 13–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/jk.a.v4i1.3305>.
- UN General Assembly. 2015. "Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development". <https://sdgs.un.org/2030agenda>.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.